

ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Faryd Muhammad
NPP. 31.0920

Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Pembimbing Skripsi: Agung Nurrahman, S.STP, M.PA

ABSTRACT

Problem statement/Background (GAP): *The focus of this research is to determine the readiness of e-government in Muna Regency. This study is necessary and worth conducting because no previous research has examined the readiness of e-government in Muna Regency.* **Purpose:** *The purpose of this research is to analyze the extent of e-government readiness in Muna Regency. Therefore, the researcher has chosen the title "Analysis of the Readiness of E-Government Implementation towards Smart Governance in Muna Regency."* **Method:** *The research method used is a quasi-qualitative method. This method is chosen because theory serves as a tool for data analysis and as a foundation for thinking from the beginning of the research. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The sampling technique used is purposive sampling. The data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis is conducted using the e-government readiness theory (Indrajit, 2005) and the smart governance theory (Giffenger, 2007).* **Results/Findings:** *The research findings indicate that Muna Regency is ready but not yet optimal in the implementation of e-government to support smart governance. However, there are shortcomings: first, network accessibility in the telecommunications infrastructure dimension; second, the level of public participation has not been maximized in the participation in decision-making dimension.* **Conclusion:** *Muna Regency's readiness for e-government implementation can be considered ready but not yet optimal. This is evident from the six dimensions described, where Muna Regency's infrastructure is good, but network infrastructure is still not optimal, especially in remote areas that still have difficulty accessing the internet. In terms of smart governance, Muna Regency involves public participation in decision-making. The community, represented by sub-district heads, holds development planning meetings (musrenbang) with the Regent of Muna annually. Public proposals as a level of participation in decision-making to establish policies will be prioritized.*

Keywords: Analysis, E-Government, Muna Regency, Smart Governance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada kurangnya fasilitas penerapan E-Government dan nilai SPBE yang masih rendah di Kabupaten Muna. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis sejauh man kesiapan e-govovernment di Kabupaten Muna. **Metode:** Penelitian menggunakan metode quasi qualitative dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengambilan sampel purposive sampling, dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori kesiapan e-government oleh Indrajit dan teori smart governance oleh Giffenger. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi partisipasi masyarakat, regulasi, dan peran aktif pemerintah masih kurang, akan tetapi pada dimensi kesiapan SDM pemda, tingkat konetifitas apenggunaan TI, dan perubahan paradigma sudah berjalan dengan baik. Infrastruktur tekomunikasi di kabupaten Muna ditemukan sudah baik hanya saja pada infrastruktur jaringan masih belum maksimal terkhusus daerah pelosok yang masih sulit mendapatkan akses internet. Smart governance Kabupaten Muna dalam mengambil keputusan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diwakili kepala kecamatan mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) bersama Bupati Muna yang diadakan tiap tahun. Usulan masyarakat sebagai tingkat partisipasi dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu kebijakan akan menjadi prioritas.

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan egov dalam mewujudkan smartgov di kab muna berjalan cukup baik.

Kata Kunci: Analisis kesiapan; E-Government; Smart Governance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-Government mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, hal ini mencerminkan peningkatan jumlah kota yang tidak menggunakan kertas. Sementara itu, penerapan e-Government di tingkat kota dapat meningkatkan pelayanan dan administrasi perkotaan. E-Government berbasis teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah diberbagai bidang.

E-Government atau “pemerintahan online,” adalah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui penggunaan TI untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan menggunakan aplikasi atau situs web yang disediakan pemerintah, masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan menyelesaikannya dengan cepat dan efisien melalui E-Government. E-Government adalah sumber daya untuk menyebarkan data mengenai penawaran pemerintah kepada masyarakat umum. Diuraikan bagaimana proliferasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadikan kota pintar sebagai obat mujarab untuk berbagai permasalahan kota, termasuk sanitasi, daur ulang, pendidikan, transportasi, pembangunan ekonomi, kesiapsiagaan darurat, kesehatan masyarakat, dan bantuan bencana (Sosiawan, 2008).

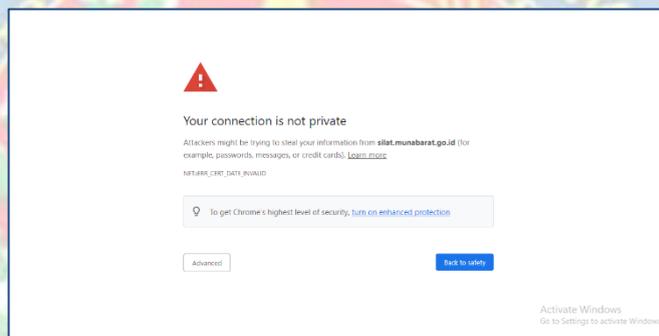
Sebuah "kota pintar" konsep yang mengutamakan sebuah tatanan kota cerdas yang dapat berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara tepat dan cepat (Oktaviani & Nugraha, 2018). Istilah “kota pintar” mengacu pada jenis kota yang secara efektif mengelola sumber daya manusianya melalui tata kelola berdasarkan masukan dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan perekonomian berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi (Rahmatullah, 2021). Kota pintar berperan dalam mengintegrasikan masyarakat, pemerintah, dan teknologi untuk mengatasi permasalahan perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Imtiyas & Roychansyah, 2023).

Salah satu daerah yang menggunakan E-Goverment yaitu Kabupaten Muna dengan menonjolkan potensi daerah melalui penggunaan sarana komunikasi modern dan penyebaran informasi. Pemerintah Kabupaten Muna telah mengembangkan sejumlah program aplikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kabupaten Muna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi lainnya. Hal ini sejalan dengan visi dan tujuan Kabupaten Muna yang mencakup kemandirian, progresifitas, keadilan, dan kemakmuran. Dalam mewujudkan Kabupaten Muna sebagai "kawasan kota pintar," pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pemerintahan elektronik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini berfokus pada permasalahan rendahnya indeks SPBE di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, serta kesulitan akses terhadap website layanan publik yang belum terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus utama bagi peneliti dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi E-Government untuk mencapai Smart Governance. Berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, infrastruktur dan koordinasi antar-OPD masih menjadi kendala serius yang perlu diatasi. Terutama, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna menjadi krusial dalam memperbaiki integrasi sistem dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi.

Tampilan website Munakab yang tidak dapat di akses



Sumber : <https://munakab.go.id/>

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan penerapan SPBE telah banyak dilakukan sebelumnya antara lain penelitian pertama oleh Teguh Kurniawan dengan judul Hambatan dan Tantangan Dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Ada beberapa hambatan yang membuat implementasi e-Government kurang optimal, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sangat kompeten dan infrastruktur TIK yang tidak memadai sehingga tingkat aksesibilitas publik terhadap e-Government menjadi rendah, perbedaan dengan penulis yaitu lokus penelitian terdahulu adalah di Gajah Mada, Yogyakarta sedangkan lokus penelitian peneliti ada di Kabupaten Muna (Kurniawan, 2006).

Penelitian kedua Kedua, Difaryadi Kusuma Pangestu (2021) yaitu Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Smart City melalui *Smart Government* di Kota Serang, Hasil penelitian menunjukkan Kurangnya anggaran menyebabkan Pemerintah Kota Serang, dalam hal ini

Diskominfo, belum bisa melakukan pengembangan program dan aplikasi secara optimal. Selain itu, kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang IT juga menjadi salah satu faktor penghambat, perbedaan dengan penulis yaitu lokus penelitian terdahulu di Kota Serang, anten sedangkan lokus penelitian peneliti ada di Kabupaten Muna (Pengestu, 2021).

Penelitian ketiga oleh Budi Nugraha dengan judul Implementasi Kebijakan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Menuju Smart Government, Hasil penelitian menunjukkan Kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, tetapi pengelolaan E-Government dalam menciptakan Smart Governance dalam tahap pelaksanaan masih lemah dari segi pengawasan. Sarana belum memadai untuk implementasi E-Government. Pola hubungan antarunit kerja dan norma-norma yang berlaku perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan E-Government dalam mewujudkan Smart Governance sudah berjalan, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan. Perbedaan dengan penulis yaitu Lokus penelitian terdahulu adalah di Kota Bandung, Jawa Barat sedangkan lokus penelitian peneliti ada di Kabupaten Muna (Nugraha, 2020)

Penelitian keempat oleh Reyhan Maulidian Salahuddin Yusuf dan Helni Mutiarsih Jumbuh tahun 2018 dengan judul Penerapan E-Government dalam Membangun Smart City pada Kota Bandung Tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan Penerapan E-Government di Kota Bandung telah terpenuhi dilihat dari berbagai sistem dan layanan yang telah diimplementasikan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai aspek pendukung smart city lainnya sehingga Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota berkonsep smart city (Maulidian, 2018).

Penelitian kelima oleh Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih dengan judul Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara), hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses kerja di pemerintahan namun belum maksimal, perbedaan dengan penulis yaitu Lokus penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sedangkan lokus penelitian peneliti ada di Kabupaten Muna (Damanik & Purwaningsih, 2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti telah melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan ini berfokus pada analisis kesiapan penerapan e-government menuju smart governance di Kabupaten

Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang dilakukan menggunakan quasi-qualitative. Untuk lokus yang diteliti tidak sama dengan fokus dalam penelitian terdahulu.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan penerapan e-government menuju smart governance di Kabupaten Muna.

II. METODE

Metode Penelitian yang digunakan yaitu quasi-qualitative, menurut Burhan Bungin metode ini merupakan salah satu desain dari postpositivism dimana menggunakan teorisasi dalam proses menyelesaikan dan memecahkan masalah atau fenomena dan konteks sosial (Bungin, 2020). Teori sebagai alat analisis data, serta menempatkan teori sebagai landasan berpikir sejak awal penelitian berlangsung. Selanjutnya, postpositivisme menolak penggunaan satu teknik dalam pengumpulan data, melainkan bermacam-macam metode melalui triangulasi yang meliputi metode, sumber data, peneliti dan teori. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas kominfo, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, Kepala Bidang Informatika Diskominfo, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan Dan Pelaporan Diskominfo, Staf Dinas Kominfo. Analisis yang dilakukan menggunakan teori kesiapan e-government (Indrajit, 2005) yang menyatakan bahwa kesiapan e-government dapat diukur dari enam dimensi yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma serta menggunakan teori smart governance dari (Fortado et al., 2023) yang menyatakan bahwa kesiapan e-government dapat diukur dari enam dimensi yaitu *Regulatory Framework*, *Strategic Funding*, *Partnership*, *Basic Digital Infrastructure*, *Data on the Invisible* dan *Social-centric policy*, dan *Anchor Institution*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penentu Kesiapan E-government di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori kesiapan e-government (Indrajit, 2005) yang menyatakan bahwa kesiapan e-government dapat diukur dari enam dimensi yaitu Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh

Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma.

3.1.1 Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur Telekomunikasi di Kabupaten Muna menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat, masih ada ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah. Contohnya, masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkan akses internet karena kualitas sinyal seluler yang buruk.

a. Komputer

Beberapa daerah di Kabupaten Muna masih kekurangan komputer yang memadai untuk mendukung layanan telekomunikasi dan administrasi pemerintahan. Infrastruktur telekomunikasi juga memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang handal. Namun, belum semua daerah memiliki akses ke perangkat yang memadai untuk mendukung smart city.

Tabel 1. Data Komputer di Diskominfo Kabupaten Muna

No	Bidang	Satuan	Keterangan
1	Bidang Infrastruktur Dasar	1	Baik
2	Bidang Opini dan Aspirasi Publik	1	Baik
3	Bidang Persandian	1	Baik

b. Jaringan

Sebagian daerah di Kabupaten Muna telah memiliki layanan internet, hal ini didukung dengan program KPU/USO Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga setiap kecamatan telah mendapat akses RENSTRA Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Muna Tahun 2021-2026. Internet melalui PLIK dan MPLIK Keberadaan layanan akses internet ini seharusnya menjadi potensi yang cukup baik untuk menumbuhkan potensi komunikasi dan informatika di Kabupaten Muna sehingga nantinya, bisnis internet dapat berkembang meskipun tanpa program bantuan langsung dari pemerintah. Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat internet berkat program KPU/USO melalui PLIK dan MPLIK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kebutuhan internet yang diiringi dengan bertambahnya pelaku bisnis internet sehingga dapat menarik para penyedia internet untuk melakukan pengembangan bisnis di Kabupaten Muna. Pengembangan layanan internet juga perlu dipercepat guna mewujudkan rencana aksi WSIS (World Summit on the Information Society) bahwa tahun 2015 sebanyak 50% wilayah di muka

bumi ini sudah terjangkau jaringan infrastruktur ICT, dan tahun 2025 seluruh permukaan bumi akan terhubung melalui jaringan ICT.

Tabel 2. Penilaian Potensi Layanan Internet

Kab/kota	Nilai	Peringkat
Kolaka	122	1
Kendari	111	2
Baubau	96	3
Muna	85	4
Konawe	58	5
Buton	57	6
Bombana	30	7
Kolaka Utara	30	8
Konawe Selatan	30	9
Wakatobi	29	10
Buton Utara	18	11
Konawe Utara	14	12

Sumber : Renstra Diskominfo Kab.Muna

c. Infrastruktur

Meskipun Kabupaten Muna menghadapi tantangan geografis, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan pelayanan berbasis e-government. Dengan melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi, mereka berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setempat

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.02 WITA mengatakan bahwa :

“Untuk fasilitas yang dimiliki saat ini sebenarnya masih terbilang kurang karena perangkat lunak dan perangkat keras masih banyak yang harus diganti dan diperbaharui apalagi komputer yang ada di kantor saat ini banyak yang rusak dan perlu diperbaiki sehingga pekerjaan yang dilakukan tidaklah maksimal. Sementara itu, jaringan internet di kabupaten muna masih terbilang lambat dikarenakan jumlah pengguna yang melebihi kapasitas jaringan dapat menyebabkan overload. Terutama di daerah padat penduduk dan khususnya daerah terpencil yang masih sulit mengakses internet”.

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Bapak Laode Muharman, S.H., M.Si pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 09.38 WITA mengatakan bahwa :

“Kantor ini masih terbilang baru dan pembangunan kantor ini masih belum lama selesai jadi kondisi sekitar kantor masih baru semua tetapi untuk infrastruktur telekomunikasi yang ada di kantor ini tidaklah baru karena komputer yang kami miliki saat ini masih komputer type lama sehingga butuh pembaharuan dan beberapa komputer yang lain mendapatkan kerusakan sehingga butuh perbaikan untuk dapat dipakai kembali. Selain itu, kami juga terkendala masalah jaringan dikarenakan letak kantor kami yang jauh dari daerah perkotaan sehingga akses jaringan internet masih lambat”.

3.1.2 Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah

a. Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Muna telah mengambil langkah strategis dalam mengembangkan pelayanan berbasis e-government. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk geografis, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, upaya ini sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. Di era Revolusi Industri 4.0, penerapan teknologi informasi menjadi semakin penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 09.46 WITA mengatakan bahwa :

“Sistem pelayanan pemerintah Kabupaten Muna telah bertransformasi dengan adopsi E-Government, memungkinkan akses layanan secara online. Pemerintah telah memberdayakan pegawai dengan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat E-Government. Investasi juga dilakukan dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung operasional E-Government. Ini bertujuan meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muna.”

b. Pemberdayaan

Pemerintah Kabupaten Muna memahami pentingnya infrastruktur dan teknologi informasi sebagai landasan utama dalam mengimplementasikan E-Government. Dengan membangun jaringan komunikasi yang efisien dan memperkuat sistem komputer, mereka memastikan aksesibilitas dan keterhubungan antara berbagai layanan publik dengan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 09.49 WITA mengatakan bahwa :

“Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Muna telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan dan pengembangan e-

government. Diskominfo bertanggung jawab untuk penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi dan pengembangan. Selain itu, Diskominfo juga berperan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2018, yang mengatur pelaksanaan e-government. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur jaringan dan komputer, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, keamanan informasi, dan pembiayaan.”

c. Pembangunan

Pembangunan e-government di Kabupaten Muna telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah daerah telah menerapkan strategi yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima. Peraturan Bupati juga telah mengatur pelaksanaan e-government yang meliputi infrastruktur jaringan dan komputer, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, keamanan informasi, dan pembiayaan. Dengan demikian, Kabupaten Muna terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan e-government yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.10 WITA mengatakan bahwa :

"Pembangunan E-Government di Kabupaten Muna telah mencapai tahap yang signifikan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata dalam mengimplementasikan berbagai layanan publik secara online. Hal ini tercermin dari adopsi sistem yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan mudah melalui internet. Meskipun masih terdapat tantangan dan ruang untuk peningkatan lebih lanjut, namun progres yang telah dicapai menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan pelayanan publik melalui teknologi informasi.

3.1.3 Kesiapan SDM di Pemerintah

a. Tingkat Keahlian

Pemerintah Kabupaten Muna telah menunjukkan kesiapan yang solid dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Tingkat keahlian SDM di Kabupaten Muna telah mencapai tingkat baik dan optimal di berbagai bidang. Hal ini menjadi landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, serta dukungan infrastruktur yang memadai, SDM di

Kabupaten Muna siap menghadapi tantangan zaman.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 09.58 WITA mengatakan bahwa :

“Secara umum, tingkat keahlian dalam teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten Muna masih perlu ditingkatkan, sehingga pemerintah kabupaten muna menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkala tentang penggunaan teknologi informasi bagi pegawai di berbagai tingkatan. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan program-program pelatihan khusus tentang e-government.”

b. Tingkat Kompetensi

Di sisi lain, tingkat kompetensi SDM di Kabupaten Muna juga telah mencapai tingkat yang baik dan optimal. Dengan kompetensi yang mumpuni, pemerintahan Kabupaten Muna dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Muna berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi SDM.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.21 WITA mengatakan bahwa :

“Pegawai di kabupaten Muna telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kompetensi terkait pengembangan e-government. Saat ini, sebagian besar pegawai memiliki pemahaman dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital yang digunakan dalam pelaksanaan e-Government.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Yasin, S.T pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09.17 WITA mengatakan bahwa :

“Ya, di Kabupaten Muna kami memiliki program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Jenis pelatihan yang diselenggarakan mencakup beragam topik, mulai dari pelatihan teknis seperti penggunaan perangkat lunak kantor, pengelolaan data, hingga pelatihan manajerial seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan komunikasi efektif. Kami juga menyelenggarakan pelatihan tentang kebijakan dan regulasi terbaru dalam berbagai bidang pelayanan publik.

3.1.4 Ketersediaan Dana dan Anggaran

a. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga tingkat keahlian dan kompetensi SDM. Ini menjadi landasan

utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemeliharaan ini mencakup pelatihan berkelanjutan dan pembaruan keterampilan untuk memastikan bahwa SDM tetap relevan dan efektif dalam lingkungan smart city yang dinamis. Selain itu, biaya pemeliharaan juga mencakup pemeliharaan alat dan infrastruktur smart city. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa semua sistem dan layanan berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pemeliharaan alat dan infrastruktur smart city menjadi bagian integral dari strategi pemerintah Kabupaten Muna dalam mewujudkan visi mereka tentang smart governance.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 10.02 WITA mengatakan bahwa :

“alokasi anggaran untuk pemeliharaan e-government telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk pemeliharaan rutin, peningkatan, dan pengembangan sistem. Meski detail spesifik tentang jumlah alokasi anggaran bersifat rahasia, kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa e-government di Kabupaten Muna dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”

b. Biaya Pengembangan

Selanjutnya, biaya pengembangan juga menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Muna. Melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, serta dukungan infrastruktur yang memadai, SDM di Kabupaten Muna siap menghadapi tantangan zaman dengan kualitas yang mumpuni. Pengembangan ini mencakup investasi dalam teknologi baru, peningkatan infrastruktur, dan inisiatif lain yang mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam smart governance.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.24 WITA mengatakan bahwa :

"Alokasi anggaran untuk pengembangan E-Government di Kabupaten Muna ditujukan untuk berbagai aspek. Ini termasuk infrastruktur jaringan dan komputer, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, keamanan informasi, dan pembiayaan.”

c. Biaya Operasional

Terakhir, biaya operasional juga menjadi bagian penting dari

strategi pemerintah Kabupaten Muna. Dengan pengelolaan biaya operasional yang efisien, pemerintahan Kabupaten Muna dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya. Biaya operasional ini mencakup biaya sehari-hari yang terkait dengan menjalankan dan memelihara layanan dan infrastruktur smart city.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Mamang Ridwan, S.Kom pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 11.22 WITA mengatakan bahwa :

“Biaya operasional e-government di Kabupaten Muna mencakup berbagai aspek, termasuk biaya infrastruktur, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta biaya pelatihan dan pengembangan SDM. Namun, untuk detail lebih lanjut mengenai biaya operasional spesifik, saya sarankan untuk menghubungi Dinas Kominfo Kabupaten Muna secara langsung atau melalui situs web resmi mereka untuk informasi yang paling akurat dan up-to-date.

3.2.1 Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang melindungi dan mengatur pengembangan smart city dan smart governance di Kabupaten Muna mencakup serangkaian instrumen regulasi yang meliputi peraturan presiden, instruksi presiden, serta peraturan bupati setempat. Pada tingkat nasional, peraturan presiden menjadi pilar utama dalam menetapkan arah dan kebijakan strategis terkait penerapan teknologi canggih dalam konteks perkotaan dan pemerintahan. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dan standar yang harus dipatuhi dalam pengembangan smart city dan smart governance.

Instruksi presiden juga berperan penting dalam memberikan panduan dan arahan khusus terkait pelaksanaan program smart city di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Muna. Instruksi ini mungkin mencakup aspek seperti pengembangan infrastruktur teknologi, pengelolaan data, keamanan cyber, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan smart city.

Di tingkat lokal, peraturan bupati Kabupaten Muna menjadi instrumen yang sangat relevan dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Melalui peraturan bupati, Kabupaten Muna dapat mengatur secara spesifik berbagai aspek pengembangan smart city, seperti tata ruang, perizinan, penggunaan lahan, dan perlindungan data. Peraturan bupati juga dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan unik masyarakat setempat, sehingga memastikan bahwa implementasi smart city dan smart governance dapat berjalan sesuai dengan konteks lokal.

Dengan demikian, melalui perangkat hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, Kabupaten Muna menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi perjalanan menuju masyarakat yang lebih cerdas dan pemerintahan yang lebih efisien.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 10.14 WITA mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya pengembangan smart city ini sudah memiliki ketentuan hukum yang melindunginya dan peraturan yang menegaskan bahwa pemerintahan harus sudah mulai berbasis elektronik yang mana setiap pelayanan sudah menggunakan aplikasi dan website sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Peraturan ini mengatur pelaksanaan e-government yang meliputi infrastruktur jaringan dan komputer; penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; kelembagaan; pengadaan barang dan jasa secara elektronik; keamanan informasi; dan pembiayaan.”.

3.2.2 Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma terkait smart city dan smart governance telah menimbulkan transformasi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara berpikir hingga kebiasaan sehari-hari. Dahulu, mungkin kita lebih terbiasa dengan pendekatan konvensional dalam mengelola kota dan pemerintahan, yang cenderung mengandalkan solusi tradisional untuk menanggapi tantangan perkotaan. Namun, dengan munculnya konsep smart city, kita dihadapkan pada paradigma baru yang lebih progresif dan inovatif.

a. Cara Berpikir

Pertama-tama, perubahan paradigma ini mencakup cara berpikir kita. Kita menjadi lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dan data untuk memahami serta mengatasi masalah-masalah perkotaan yang kompleks. Berpikir secara inovatif dan terhubung dengan teknologi merupakan aspek penting dalam menyikapi tantangan yang semakin berkembang di era digital ini.

b. Cara Kerja

Selanjutnya, cara kerja kita mengalami transformasi yang signifikan. Integrasi teknologi dalam setiap aspek pelayanan publik dan manajemen kota menjadi norma baru. Pemanfaatan sensor, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan analisis data menjadi bagian tak terpisahkan dalam mengoptimalkan operasional kota dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

c. Bersikap

Perubahan paradigma ini juga tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Kita menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Sikap terbuka terhadap perubahan dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perkembangan smart city dan smart governance.

d. Berperilaku

Ketika bekerja dalam lingkungan smart governance di Kabupaten Muna, penting untuk selalu beradaptasi dengan teknologi dan inovasi baru. Ini berarti memahami dan menggunakan platform dan alat digital yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penting untuk selalu menjaga etika dan profesionalisme dalam berkomunikasi secara digital. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi, serta menghormati hak dan privasi orang lain. Selain itu, dalam smart governance, partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, berikan masukan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan layanan dan proses. Akhirnya, selalu ingat bahwa tujuan utama smart governance adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, selalu berusaha untuk mencapai tujuan ini dalam semua tugas dan tanggung jawab Anda.

e. Kebiasaan Sehari-hari

kebiasaan sehari-hari kita mengalami transformasi karena adopsi teknologi dalam kehidupan kota yang semakin pintar. Mulai dari berbelanja dengan aplikasi e-commerce, berkomunikasi melalui platform digital, hingga menggunakan transportasi umum yang terhubung secara cerdas, teknologi telah merubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dengan adanya perubahan paradigma ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk terus mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan, dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi. Kita juga diingatkan akan pentingnya memastikan bahwa perkembangan teknologi dan implementasi smart city selalu diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi semua warga kota.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna Bapak Laode Muharman, SH, M.Si pada tanggal 9 Januari 2024 pada pukul 09.49 WITA mengatakan bahwa :

“Pemimpin kami melihat *E-Government* sebagai solusi strategis untuk meningkatkan akses publik terhadap layanan pemerintah, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas. Mereka menganggap E-Government sebagai filosofi pelayanan publik modern dan inklusif, dengan pendekatan holistik yang memperhatikan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, kebijakan yang mendukung, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan good

governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas pemerintah.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 10.21 WITA mengatakan bahwa :

“Dinas Kominfo memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan *E-Government* di Kabupaten Muna. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung berbagai layanan publik online. Cara kerja mereka dimulai dengan melakukan evaluasi kebutuhan teknologi informasi, kemudian Dinas Kominfo bekerja sama dengan unit-unit pemerintahan terkait untuk mengimplementasikan solusi teknologi yang telah dirancang. Hal ini meliputi pengembangan aplikasi, pembangunan website resmi, dan penyediaan infrastruktur jaringan yang aman dan handal.”

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.26 WITA mengatakan bahwa :

“Pegawai di Kabupaten Muna merespons perubahan sistem pemerintahan berbasis online dengan beragam sikap. Sebagian besar dari mereka menunjukkan antusiasme dan kesiapan dalam menghadapinya. Mereka melihat adopsi teknologi ini sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas kerja. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian pegawai yang merasa cemas atau kurang nyaman dengan perubahan ini. Beberapa dari mereka mungkin merasa tertekan oleh tantangan baru dalam mempelajari teknologi yang belum mereka kuasai sepenuhnya”.

3.2 Penerapan Konsep *Smart governance* di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Analisis yang dilakukan menggunakan teori smart governance dari Fortado (2023) yang menyatakan bahwa kesiapan e-government dapat diukur dari enam dimensi yaitu *Regulatory Framework*, *Strategic Funding*, *Partnership*, *Basic Digital Infrastructure*, *Data on the Invisible* dan *Social-centric policy*, dan *Anchor Institution*.

3.2.1 Regulatory Framework

Dimensi regulatory framework bermakna sebagai koridor hukum yang diimplementasikan pada level pemerintahan kabupaten/kota. Pada dimensi ini diukur melalui ada tidaknya koridor

tersebut dan jika ada maka berapa banyak dan apa saja. Adapun kualitasnya diukur dari seberapa jauh tingkat penerapan aturan tersebut. Namun penulis kesulitan dalam mengukur Tingkat penerapan aturan tersebut. Namun, penulis kesulitan untuk mengukur Tingkat penerapan aturan karena waktu yang disediakan itu sangat terbatas untuk melakukan penelitian.

Secara teoritis disebutkan bahwa smart governance merupakan salah satu bagian dari smart city sehingga sebagian besar peraturan yang menjadi fondasi smart governance pun ada di regulasi smart city. Berikut regulasi smart city di Kabupaten Muna.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 10.30 WITA mengatakan bahwa :

“Ketentuan hukum yang mendukung pengembangan smart city di Kabupaten Muna sudah terstruktur dengan baik melalui regulasi yang mewajibkan pemerintahan berbasis elektronik, memanfaatkan aplikasi dan situs web untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Peraturan Bupati Muna Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government mengatur secara komprehensif implementasi E-Government, mencakup infrastruktur teknologi, pengembangan dan penyediaan aplikasi, pengelolaan data, peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, pengadaan secara elektronik, keamanan informasi, serta pembiayaan”.

3.2.2 Strategic Funding

Dalam penyusunan anggaran maka diperlukan sebuah tim anggaran yang bertugas untuk melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan. Untuk saat ini, di Pemerintah Kabupaten Muna telah memiliki tim anggaran tetapi masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum dimasukkan ke dalam tim anggaran yang telah dibuat contohnya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna.

Gambar 1. Alokasi Anggaran Diskominfo Kab. Muna

No	Program/Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A.	BELANJA	1 Tahun	4.280.927.856
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Muna			3.525.452.406
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	78.492.750
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Paket	51.680.500
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 Paket	4.999.700
c	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	1 Paket	1.999.350
d	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	19.813.200
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.059.262.700
a	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket	3.056.263.400
c	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1 Paket	2.999.300
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1.998.900
a	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Paket	1.998.900
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	10.221.850
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	10.221.850
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	168.774.450
a	Penyediaan bahan logistik kantor	1 Paket	6.975.000
b	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	9.999.450
c	Penyediaan bahan bacaan dan pertauran perundang – undangan	1 Paket	1.800.000
d	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	150.000.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	191.701.756
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 Paket	37.225.000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket	154.476.756
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	15.000.000
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1 Paket	15.000.000
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik			307.482.824
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Muna	1 Paket	307.482.824



	a	Layanan Hubungan Media	1 Paket	307.482.824
Program pengelolaan aplikasi informatika				423.992.626
1.		Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sup domain dilingkup Pemerintah Daerah Kab. Muna	1 Paket	423.992.626
	a	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Paket	423.992.626
Program penyelenggaraan statistik sektoral				12.000.000
1.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	12.000.000
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Paket	12.000.000
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				12.000.000
1.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	12.000.000
	a	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	12.000.000

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah,S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.19 WITA mengatakan bahwa :

“Untuk penyusunan anggaran sampai saat ini Diskominfo belum diikutsertakan dan dimasukan dalam tim evaluasi anggaran sehingga kami kesulitan dalam memasukkan anggaran untuk melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak dalam meningkatkan infrastruktur smart city. Sekarang kami hanya bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk keperluan infrastruktur pengembangan smart city.”

3.2.3 Patnerships

Untuk Merealisasikan smart city pada dimensi smart governance maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Semua ini terjadi karena banyaknya masalah yang berhubungan dengan konsep smart city secara umum dan smart governance secara khusus. Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan smart city tidaklah cukup hanya mengandalkan peran pemerintah. Dibawah ini terdapat tabel mengenai kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan smart governance Kabupaten Muna.

Partisipan dalam Partnership pada Penerapan Smart city dalam Dimensi Smart governance di Kabupaten Muna

No	Aktor	Implementasi
1	Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Muna
2	Akademisi	Universitas Persada Muna
3	Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Muna
4	Swasta	PT. Telekomunikasi Indonesia

Sumber : Analisa Penulis, 2023

Mengacu pada tabel di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah ada peran di luar pemerintah yang berpartisipasi dalam merealisasikan smart city Kabupaten Muna. Walaupun mereka sebagian kecil dari aspek di luar pemerintah yang ada di Kabupaten Muna secara khusus. Dalam konteks yang lebih umum dikatakan bahwa setiap pihak yang sadar bisa turut andil dalam pengembangan smart governance di Kabupaten Muna. Untuk aktor yang saat ini sudah berpartisipasi menunjukkan kurangnya tingkat minat yang mereka miliki dari pengembangan dan implementasi smart city secara umum dan smart governance secara khusus.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Muhammad Haidar, S.T pada tanggal 11 Januari 2024 pada pukul 10.36 WITA mengatakan bahwa :

“tingkat smart city di Kabupaten Muna masih minim, diantaranya ditinjau dari segi kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan smart city karena jujur saja kami sebagai pihak pemerintah masih kesulitan jika harus mengembangkan smart city sendirian tanpa adanya kerjasama dengan pihak swasta ataupun masyarakat setempat”.

Diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Yasin, S.T pada tanggal 10 Januari pukul 10.24 WITA mengatakan bahwa :

“Kerjasama dengan pihak eksternal sudah kami lakukan untuk merealisasikan smart city di Kabupaten Muna sehingga pihak eksternal dapat berperan aktif dan memberikan masukan karena kami berpikir jika hanya diskominfo saja yang turut andil dalam proyek pengembangan smart city dan smart governance maka kami tidak akan mampu sehingga kami mengundang pihak eksternal untuk melakukan kerjasama sehingga dapat merealisasikan smart city dan smart governance”.

3.2.4 Basic Digital Infrastruktur

Basic Digital Infrastructure yang sudah diaplikasikan oleh pemerintah di wilayah Indonesia umumnya merujuk pada kebijakan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini jika dilihat secara umum memiliki banyak kemiripan dengan konteks Basic Digital Infrastructure dari teori Furtado et al (2023).

Menurut ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE. Infrastruktur SPBE melingkupi berbagai jenis perangkat keras, perangkat lunak dan berbagai fasilitas yang menjadi roda penggerak dalam menjalankan sebuah sistem, aplikasi, pengelolaan data, dan tempat penyimpanan sebuah data serta perangkat elektronik lainnya yang terhubung di dalamnya. Infrastruktur dasar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muna saat ini sangatlah minim karena masih terhalang dengan kurangnya dana yang menjadi masalah utama dan penghalang dalam pengembangan infrastruktur. Banyaknya infrastruktur yang mulai mengalami kerusakan dan kendala teknis yang memerlukan perawatan rutin.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna Bapak Laode Firmansyah, S.STP pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10.24 WITA mengatakan bahwa :

“Saat ini kami memiliki kendala besar dalam anggaran yang menyebabkan kami kesulitan untuk melakukan peningkatan pada infrastruktur dasar dan perbaikan untuk infrastruktur yang sudah ada jadi untuk saat ini, kami hanya memaksimalkan anggaran yang ada untuk infrastruktur yang dibutuhkan”.

3.2.5 Data on the Invisible and Social-centric policy

Untuk teori yang digunakan oleh peneliti yang mengacu pada Furtado et al (2023) yang di dalamnya terdapat aspek sosial masyarakat yang dianggap tidak terlihat (invisible). Invisible yang dimaksudkan disini yaitu masyarakat yang merupakan kepingan yang tidak diperhitungkan dan tidak terlihat, artinya identitas dan kontribusi yang mereka lakukan itu tidaklah dianggap atau biasanya diabaikan, untuk kasus yang lebih jauh dapat dilihat bahwa data mereka biasanya diabaikan bahkan tidak ada sama sekali.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yaitu peneliti meninjau langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat dan peneliti mencoba mengambil data dengan melakukan wawancara dari pihak terkait yang mana merupakan Kepala Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Bapak Laode Moammad Khadahafy, S.H,M.H pada tanggal 12 Januari 2024 pada pukul 09.02 WITA mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi 'invisible' dalam konsep smart governance. Pertama, kurangnya aksesibilitas teknologi di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau yang kurang berkembang. Kedua, rendahnya literasi digital dan pemahaman tentang konsep smart governance membuat sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara efektif. Ketiga, adanya kesenjangan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat sulit untuk mengakses teknologi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang berbasis digital. Dan terakhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan konsep smart governance dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, yang pada akhirnya membuat mereka merasa 'invisible' atau terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.”

3.2.6 Anchor Institution

Ketika ingin mencapai smart city secara umum dan secara khusus smart governance maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak yakni internal dan eksternal pemerintah. Untuk pihak pemerintah perlu lebih memfokuskan potensi yang mereka miliki dengan cara memaksimalkan unit dan bagian yang berada di bawahnya. Unit yang dimaksudkan disini adalah SKPD yang dibawah oleh Pemerintah Kabupaten Muna.

Pihak eksternal yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muna memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi smart city secara umum, secara khususnya smart governance. Pihak eksternal ini diantaranya ada instansi pendidikan yaitu Universitas Persada Muna dan pihak swasta yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia.

Saat ini, peran utama dari penyelenggaraan smart city dan smart governance masih saja dibebankan kepada satu pihak dan tanggungjawab inipun dipikul oleh diskominfo. Hal ini memang menjadi hal yang baik untuk diskominfo untuk memegang kendali dalam proyek pengembangan smart city dan smart governance tetapi perlu diketahui bahwa setiap instansi diluar pemerintah juga harus memiliki arah dan tujuan yang jelas ketika turut andil dalam proyek pengembangan smart city. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa Anchor Institution dari smart governance di Pemerintah Kabupaten Muna masih menitikberatkan satu sisi yaitu diskominfo saja.

Berdasarkan tanya jawab penulis bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna, Bapak Muhammad Haidar, ST, pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 10.40 WITA, beliau mengatakan bahwa :

“Jadi terkait dengan dengan instansi yang menjadi tumpuan dan memegang tanggungjawab dalam proyek pengembangan smart city dan smart governance saat ini adalah diskominfo yang mana kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak luar tetapi tanggungjawab ini masih menjadi tugas kami karena merasa bahwa tim kami memiliki keahlian yang lebih kompeten dibandingkan dari pihak eksternal walaupun begitu mereka masih memiliki peran dan tugas aktif dalam merealisasikan smart city.”

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menilai kesiapan e-government menuju smart governance di Kabupaten Muna. Temuan menunjukkan bahwa kesiapan penerapan E-Government sudah dapat dikatakan siap tetapi belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari 6 (dimensi) yang sudah dijabarkan dimana Kabupaten Muna dari segi infrastruktur sudah baik hanya saja pada infrastruktur jaringan masih belum maksimal terkhusus daerah pelosok yang masih sulit mendapatkan akses internet. Pada penyelenggaraan e-government tentunya menjalankan 3 (tiga) fungsi pemerintahan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, 3 (tiga) fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab Muna mulai dari layanan online, pelatihan jurnalistik untuk Aparatur Sipil Negara dan pengembangan website terpadu dan terintegritas. Sumber daya manusia (pegawai) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muna berpotensi berkualitas relatif baik dengan ukuran tingkat keahlian dan tingkat kompetensi sudah sesuai dengan bidang tugasnya. Penyelenggaraan E-Government Kabupaten Muna tentunya didukung dari anggaran yang sudah ditetapkan Pemkab Muna dengan jumlah yang lumayan besar (biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya pengembangan). Penerapan E-Government Kabupaten Muna tidak berjalan begitu saja tentunya sudah diatur dengan regulasi dan batas koridornya mulai dari peraturan presiden, peraturan bupati, dan intruksi presiden. Hadirnya E-Government tentu memberi dampak kepada para pegawai Diskominfo Kabupaten Muna, salah satunya terjadi perubahan paradigma pada pegawai yang terlihat dan terasa pada cara berfikir serba digital, cara kerja, bersikap, berperilaku dan kebiasaan pegawai sehari-hari yang menggunakan digital.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan 2. E-Government yang baik dapat mendukung terwujudnya smart governance (tata kelola yang cerdas) juga. Smart governance Kabupaten Muna dalam mengambil keputusan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diwakili kepala kecamatan

mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) bersama Bupati Muna yang diadakan tiap tahun. Usulan masyarakat sebagai tingkat partisipasi dalam mengambil keputusan untuk menetapkan suatu kebijakan akan menjadi prioritas. Kabupaten Muna telah menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi perjalanan menuju masyarakat yang lebih cerdas dan pemerintahan yang lebih efisien melalui implementasi smart governance. Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Muna menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam akses dan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang perlu diperbaiki untuk mendukung konsep smart city. Kerjasama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan akademisi, menjadi faktor penting dalam mewujudkan konsep smart city dan smart governance di Kabupaten Muna. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran kunci dalam mengembangkan e-government di Kabupaten Muna, merancang, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung layanan publik online. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan E-Government, seperti Peraturan Bupati Muna Nomor 17 Tahun 2018, memberikan landasan hukum yang mendukung transformasi menuju pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa atau berbeda berkaitan dengan kesiapan e-government menuju smart governance di Kabupaten Muna.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajar Rahmatullah. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance Dalam Paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Ijd-Demos*, 3.2 (2021). <http://dx.doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>
- Budi Nugraha. (2020). Implementasi Kebijakan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Menuju Smart Government. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47793>
- Burhan Bungin. (2022). *Post Qualitative Social Research Methods*. Ketiga Jakarta: K E N C A N A.
- Difaryadi Kusuma Pangestu. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Smart City melalui Smart Government di Kota

- Serang. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.660>
- Dwitawidyaningsih. 2017. Kota Surabaya Menuju Smart City. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/63560>
- Edwi Arief Sosiawan. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. semnasIF 99–108. <https://www.neliti.com/publications/175130/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-e-government-di-indonesia#cite>
- Furtado dkk., (2023). dalam Hasibuan and Sulaiman. Smart City, Konsep Smart City Sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara', Buletin Utama Teknik, 14.2 (2019), 127–35 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097/853>
- Imtiyas, S., & Roychansyah, M. S. (2023). Evaluasi tingkat maturitas smart governance di Kota Surakarta tahun 2018 - 2020. Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 18(2). <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.62946>
- Indrajit, Zainudin, And Rudianto “Electronic Government In Action”. https://www.academia.edu/30156351/Electronic_Government_in_Action
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
- Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). <http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2018.220207>
- Oktaviyani, W., & Nugraha, J. T. (2018). Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart City di Kota Magelang (Studi Kasus Bappeda Kota Magelang). Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 02(01). <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/218/0>
- Purbayu, A. (2023). Perancangan Monitoring Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Surakarta. Indonesian Journal of Applied Informatics, 7(1). <https://doi.org/10.20961/ijai.v7i1.67570>
- Sutopo, H., Anisah, B., & Syaukhi Mishbakh M. (2020). Optimalisasi Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Menjadi Berdaya Guna. Jurnal Abdi Bhayangkara. http://ejournal.lppm.ubhara.id/index.php/jurnal_abdi/article/view/45
- Teguh Kurniawan. Hambatan dan Tantangan Dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia. <https://adoc.pub/hambatan-dan-tantangan-dalam-mewujudkan->

good-governance-mela.html

